BAB II

TINJAUAN TENTANG UNITED NATIONS WOMEN

Keseriusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan dan mengurangi permasalahan diskriminasi terhadap kaum perempuan di dunia telah ditunjukkan secara nyata dalam beberapa deklarasi, perjanjian, norma dan standar Internasional yang telah diciptakannya untuk dapat diterapkan, diterima dan dipatuhi oleh Negara-negara anggotanya. *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW) pada tahun 1981 dan *Beijing Platform Action* merupakan contoh dari penetapan standar / norma dan deklarasi Internasional yang berupaya untuk mengurangi permasalahan diskriminasi terhadap perempuan dimana anggota-anggota PBB dapat meratifikasinya sehingga dapat menerapkan norma tersebut pada negaranya.

Kemudian, dalam memaksimalkan standar dan norma Internasional yang telah ada dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi perempuan di dunia, PBB juga menciptkan sebuah entitas atau organisasi yang berfokus dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sehingga dapat memaksimalkan norma tersebut dan saling bekerjasama dengan entitas PBB yang lainnya. Entitas yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang telah diciptakan PBB adalah United Nations Women (UN Women).

A. Latar Belakang Lahirnya UN Women

Dalam menanggapi resolusi Majelis Umum PBB 63/311, pada Januari 2006 Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon mempresentasikan laporan A / 64/588 yang berjudul Proposal Komprehensif mengenai pembentukan suatu Entitas Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau *"Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*.". Sekertaris Jendral Ban-Ki Moon dalam laporannya tersebut memutuskan bahwa dibentuknya sebuah entitas baru tersebut akan lebih membantu sistem badan-badan PBB lainnya dalam melakukan tanggungjawab mereka untuk berkontribusi mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan entitas baru tersebut harus berusaha untuk mempertajam fokus dan dampak dari kegiatan kesetaraan gender dari seluruh sistem PBB.[1]

Setelah terjadinya negosiasi antara negara-negara anggota PBB, kelompok-kelompok perempuan dan masyarakat sipil selama bertahun-tahun, pada tanggal 2 Juli 2010, Majelis Umum PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi 64/289, yang pada akhirnya sepakat untuk menciptakan United Nations Women (UN Women).

Berdirinya UN Women merupakan bentuk pengambilan langkah besar bagi perkembangan perempuan di dunia ke depan yang melibatkan negara-negara

[1] "Report on the Secretary General: Comprehensive proposal for the composite entity for gender equality and the empowerment of women". *United Nations. 2010-01-06 dalam* http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/588 diakses 22 Maret 2017

anggota PBB. Terbentknya UN Women ini menggantikan entitas sebelumnya, yaitu UNIFEM (Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan atau *United Nations Development Fund for Women*) yang juga merupakan anggota kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. UN Women hadir sebagai salah satu agenda reformasi PBB dan menyatukan sumber daya serta mandat untuk menciptkan perubahan dan dampak yang lebih besar sehingga secara signifikan meningkatkan upaya-upaya PBB untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperluas kesempatan, dan mengatasi diskriminasi di seluruh dunia.

UN Women berdiri dari empat bagian yang berbeda dari sistem PBB yang sebelumnya yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu:

- Divisi untuk Pemajuan Perempuan atau *Division for the Advancement of Women* (DAW)
- Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan atau *International Research and Training Institute for the Advancement of Women* (INSTRAW)
- Kantor Penasihat Khusus Isu Gender dan Kemajuan Wanita atau *Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women* (OSAGI)
- Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan atau *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM).

Tujuan dibentuknya UN Women adalah untuk meningkatkan upaya yang dilakukan sistem PBB lainnya, seperti UNICEF, UNDP, dan UNFPA, yang semuanya bekerja secara bekelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, diarea keahlian masing-masing.

Di tahun pertamanya UN Women didanai sekitar $ 500.000.000. Sekretaris Jenderal Ban Ki-Moon memperkirakan bahwa sekitar $125.000.000 per tahun dibutuhkan untuk biaya operasional dan penyediaan kapasitas di Negara, regional dan tingkat kantor pusat. Selain itu, tambahan $ 375.000.000 per tahun dibutuhkan dalam tahap awal untuk menanggapi permintaan tingkat Negara untuk dukungan programnya. [2]

Mantan presiden Chili, Michelle Bachelet diangkat sebagai diangkat sebagai Direktur Eksekutif pertama UN Women pada tanggal 14 September 2010.[3] Selama Debat Umum pada pembukaan Majelis Umum ke-65 PBB, berbagai Negara mendukung pembentukan badan UN Women ini dan menyambut Bachelet sebagai ketua. Para pemimpin dunia memuji dan merespon positif pembentukan badan tersebut dan niat untuk memberdayakan perempuan serta menyambut posisi Bachelet sebagai pemimpin UN Women yang pertama.[4]

Ketentuan yang ditetapkan oleh resolusi 63/311 pada seluruh sistem koherensi, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 2 Oktober

---

[2] "About UN Women", diakses dalam http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women, diakses 22 Maret 2017
[3] Ibid

[4] Michelle Bachelet president of Chile dalam https://www.britannica.com/biography/Michelle-Bachelet diakses 13 Maret 2017

2010, merupakan *blue print* bagi UN Women. Di dalam resolusi 63/311 juga tercantum bahwa untuk memperkuat pengaturan kelembagaan PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, PBB mendukung konsolidasi empat bagian yang berbeda dari sistem PBB yang berfokus pada kesetraan gender dan pemberdayaan peremouan menjadi sebuah entitas komposit yang akan dipimpin oleh seorang Perwakilan Sekretaris Jenderal (*Under Secretary-General*). Selain itu, resolusi juga meminta agara Sekretaris Jenderal PBB menghasilkan proposal yang menentukan pernyataan misi dan entitas komposit dan aturan-aturan organisasi, pendanaan dan dewan eksekutif untuk mengawasi kegiatan operasionalnya.[5]

Berdasarkan ketentuan resolusi 64/289, UN Women akan bekerja dalam kerangka Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Eliminatuon of All Forms Discrimination Agains Women* , *Beijing platform for Action* , termasuk 12 wilayah kritis kepedulian dan hasil khusus dua puluh tiga sidiang Majelis Umum serta instrument PBB yang berlaku lainnya, standar dan resolusi yang membahas kesetaraan gender dan pemberdayaan dan kemajuan wanita.[6]

B. Peran dan Program UN Women

B.1. Peran UN Women

[5] "Resolution on 6/311 on system-wide coherence". *United Nations General Assembly. 2010-11-09.* diakses 13 Maret 2017
[6] Loc Cit.

Setelah pembentukannya di tahun 2010 oleh majelis umum PBB dan mulai beroprasional di tahun 2011, UN Women telah tumbuh sebagai lembaga yang besar dalam setiap bidang, apakah itu normatif antar pemerintah dan komitmen politik; advokasi dan komunikasi; pengetahuan; pusat keunggulan dan pelatihan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta agenda hak-hak perempuan; pemantauan dan pembentuk akuntabilitas; koordinasi sistem PBB untuk memberikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

UN Women merupakan prestasi global bagi perempuan dan anak-anak perempuan. Karena pembentukan UN Women merupakan penggabungan dari mandate dan fungsi dari empat badan PBB terdahulunya yang sama-sama bertujuan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu tujuan terbentuknya UN Women ini mengandung keseluruhan tujuan dari empat badan PBB tersebut. Untuk dapat mencapai tujuan, UN Women menjalankan perannya sebagai sebuah badan khusus dibawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC). Berikut adalah peran utamanya :[7]

1. Untuk mendukung badan-badan antar-pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan atau *Comission on the Status of Women* (CSW), dalam menerapkan kebijakan, standar global, dan norma-norma.
2. Untuk membantu negara-negara anggota PBB menerapkan standar yang telah disepakati, siap untuk memberikan dukungan baik dalam hal teknis

[7] About UN Women, Op Cit.

maupun keuangan yang cocok untuk Negara-negara yang memintanya dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.

3. Untuk memungkinkan Negara-negara anggota untuk memegang sistem PBB untuk bertanggung jawab atas komitmennya sendiri tentang kesetraan gender, termasuk pemantauan berkala dari kemajuan sistem secara keseluruhan.

B.2. Program Kerja UN Women

Program UN Women telah berjalan di 90 negara yang menempatkan arsitektur regional, diperkuat dan didorong dalam undang-undang, kebijakan, tindakan, jasa dan pelaksanaannya serta kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta.

Dalam menjalankan tugasnya UN Women memiliki fokus program-program di bidang-bidang berikut :

a) **Kepemimpinan dan Partisipasi Politik/ *Leadership and Political Participation***

Dari lokal ke tingkat global, kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan dibatasi. Perempuan kurang terwakili sebagai pemilih, serta di posisi terdepan, baik dalam pemerintahan, layanan sipil, sektor swasta atau akademisi. Hal tersebut masih terjadi walaupun mereka terbukti memiliki kemampuan sebagai pemimpin dan agen perubahan, dan memiliki hak untuk berpartisipasi secara sama dalam pemerintahan yang demokratis.

Wanita menghadapi beberapa hambatan dan tantangan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hambatan struktural melalui hukum

dan lembaga-lembaga yang diskriminatif masih membatasi pilihan perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang kehidupan . Adanya Kesenjangan kapasitas yang berarti wanita mungkin lebih kurang dibandingkan pria untuk memiliki pendidikan, kontak dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif.

Dalam resolusi 2011 Majelis Umum PBB pada catatan partisipasi politik perempuan, "Perempuan di setiap bagian dunia sebagian besar terus terpinggirkan dari bidang politik, hal tesebut sebagai akibat dari undang-undang yang diskriminatif, praktek, sikap dan stereotip jender, tingkat pendidikan yang rendah , kurangnya akses ke perawatan kesehatan dan efek yang tidak proporsional kemiskinan pada perempuan."[8]

Program UN Women tentang kepemimpinan dan partisipasi yang berlandaskan oleh riwayat komitmen internasional untuk keterwakilan perempuan seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang menjunjung tinggi hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, sementara pada Beijing Platform for Action yang juga menghilangkan hambatan untuk partisipasi yang sama. The Millennium Development Goals mengukur kemajuan menuju kesetaraan gender sebagian oleh proporsi perempuan di kursi parlemen.[9]

---

[8] http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation diakses 22 Maret 2017
[9] Ibid

Untuk mencapai tujuan tersebut, UN Women memberikan pelatihan bagi kandidat politik perempuan untuk membantu membangun kapasitas mereka, dan menawarkan pendidikan kewarganegaraan dan kampanye sensitisasi tentang kesetaraan gender. UN Women kembali mendukung kesetaraan gender dalam partai politik, pemerintah dan menyerukan publik untuk berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan. Inisiatif lain yaitu dengan mendorong generasi muda untuk terlibat dalam advokasi kesetaraan gender dalam pembuatan kebijakan publik.[10]

UN Women mengadvokasi untuk adanya reformasi legislatif dan konstitusional untuk menjamin akses yang adil bagi perempuan untuk bidang politik sebagai pemilih, kandidat, pejabat terpilih dan anggota pegawai negeri. UN Women bekerja sama dengan tim negara PBB dan masyarakat sipil dalam suatu program sehingga pemilihan menjunjung hak-hak perempuan, termasuk untuk memilih dan kampanye bebas dari kekerasan pemilu.

b) **Pemberdayaan Ekonomi /** ***Economic Empowerment***

Investasi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan menetapkan jalur langsung menuju kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Wanita yang sebenarnya mampu membuat kontribusi besar dalam ekonomi, baik dalam bisnis, pertanian,

[10] Ibid

sebagai pengusaha atau karyawan, atau dengan melakukan pekerjaan yang tidak dibayar di rumah sebagai ibu rumah tangga.

Akan tetapi dalam kontribusinya tersebut perempuan masih tidak memiliki posisi yang proporsional, hal itu dipengaruhi oleh kemiskinan, diskriminasi dan eksploitasi. Diskriminasi gender berarti bahwa perempuan hidup dalam kondisi yang tidak aman, pekerjaan dengn upah rendah, dan merupakan minoritas kecil dari orang-orang dalam posisi senior. Hal tersebut akses ke aset-aset ekonomi seperti tanah dan pinjaman. Ini membatasi partisipasi dalam membentuk kebijakan ekonomi dan sosial. Dan, karena wanita melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga, mereka sering memiliki sedikit waktu tersisa untuk mengejar peluang ekonomi.

Banyak komitmen internasional yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk Beijing Platform for Action, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan serangkaian Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang kesetaraan gender. Sejalan dengan hal tersebut, UN Women mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan , dan dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender secara signifikan memberikan kontribusi untuk majunya perekonomian dan pembangunan berkelanjutan.

Bekerja dengan berbagai mitra, program UN Women mempromosikan kemampuan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mengakumulasi aset, dan mempengaruhi lembaga dan

kebijakan publik menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu bidang penting dalam fokus yaitu dengan melibatkan advokasi untuk mengukur pekerjaan perempuan yang tidak dibayar , dan untuk mengambil tindakan sehingga perempuan dan laki-laki dapat lebih mudah memadukannya dengan pekerjaan yang dibayar.[11]

Dalam semua program pemberdayaan ekonomi, UN Women menjangkau perempuan yang paling membutuhkan, seringkali dengan melibatkan akar rumput dan organisasi masyarakat sipil, terutama kelompok marjinal termasuk perempuan pedesaan, pekerja rumah tangga, beberapa migran dan perempuan berketerampilan rendah. Tujuannya adalah memberikan mereka pendapatan yang lebih tinggi, akses yang lebih baik ke dan kontrol atas sumber daya, dan keamanan yang lebih besar, termasuk perlindungan dari kekerasan.[12]

c) Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan / *Ending Violence Against Women*

Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Kekerasan yang terjadi di tempat-tempat publik dan area pribadi misalnya kekerasan pasangan rumah tangga yang berujung pada pelecehan dan penyerangan seksual, mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*), perdagangan perempuan (*trafficking*), kekerasan seksual dalam konflik dan pembunuhan terkait gender.[13]

---

[11] http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment diakses 24 Maret 2017
[12] Ibid
[13] http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women diakses 24 Maret 2017

Dampak kekerasan tersebut dapat terjadi dari jangka waktu yang pendek sampai pada jangka panjang yang berakibat pada kesehatan fisik, seksual dan mental bagi perempuan bahkan sampai kematian. Hal tersebut secara negatif mempengaruhi kesejahteraan umum perempuan dan menghambatan perempuan sepenuhnya untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Kekerasan tidak hanya memiliki konsekuensi jangka panjang bagi wanita tetapi juga keluarga mereka, masyarakat dan negara pada umumnya. Kekerasan dapat mengeluarkan biaya yang luar biasa, dari perawatan kesehatan yang lebih besar dan biaya hukum kerugian produktivitas dan berdampak anggaran nasional dan pembangunan secara keseluruhan. Banyak negara-negara yang memiliki undang-undang dan kebijakan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Akan tetapi, mereka masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut. Perempuan masih kekurangan akses ke layanan penting gratis atau terjangkau di sektor-sektor seperti kesehatan, polisi, keadilan dan dukungan sosial untuk menjamin keselamatan perlindungan dan pemulihan merela. Belum ada langkah yang cukup dilakukan untuk mencegah kekerasan, yang merupakan cara yang paling menantang tapi juga efektif untuk menghilangkan kekerasan secara berkelanjutan.

UN Women bekerja untuk mencegah dan menanggapi kekerasan, untuk meningkatkan akses ke layanan bagi korban dan untuk membuat ruang pribadi dan publik yang lebih aman bagi perempuan . Di tingkat

global UN Women bekerja untuk memajukan kebijakan internasional memberikan dukungan kepada Majelis Umum PBB dan Komisi Status Perempuan, dan memastikan bahwa agenda pembangunan pasca-2015 termasuk target spesifik untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.[14]

Perjanjian di tingkat internasional memberikan acuan bagi UN Women dalam mendukung negara-negara dalam mengadopsi dan melaksanakan hukum dan kebijakan selaras dengan standar internasional. Untuk melakukan hal ini, UN Women bermitra dengan Pemerintah, badan-badan PBB, organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga lain untuk membangun kapasitas dalam mencegah dan menanggapi kekerasan dan untuk meningkatkan kesadaran sebab dan akibatnya.

UN Women memberikan bimbingan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan fokus untuk merubah sikap dan perilaku Negara atau masyarakat yang mentolerir kekerasan tersebut dan mengabadikan ketidaksetaraan gender. UN Women melakukan hal ini dengan mengidentifikasi praktek-praktek yang baik dan berbagi dengan stakeholder terkait. UN Women juga menyediakan panduan tentang bagaimana meningkatkan kualitas dan akses ke layanan penting.[15]

d) **Perdamaian dan Keamanan** ***/ Peace and Security***

[14] Ibid
[15] Ibid

Konflik berdampak untuk menghancurkan, termasuk dalam memperluas kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Wanita sering memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk melindungi diri mereka sendiri dan juga pada anak-anak, yang akhirnya menjadikan mereka sebagai mayoritas pengungsi. Taktik perang seperti kekerasan seksual secara khusus menargetkan mereka. Meskipun perempuan telah mampu menggerakan perdamaian dan mendorong pemulihan setelah konflik, mereka hampir sepenuhnya hilang dari perundingan perdamaian.

Masyarakat internasional telah mengakui bahwa partisipasi perempuan sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan perdamaian. Wanita terbukti agen perubahan dan harus bisa berbuat lebih banyak lagi. Keterlibatan perempuan dalam perdamaian dan keamanan merupakan sesuatu yang penting untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan, namun kemajuan menuju kesetaraan gender masih lambat.

Pada tahun 2000, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi bersejarah 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan. Resolusi ini, dengan empat pilar pencegahan, partisipasi, perlindungan dan pembangunan perdamaian dan pemulihan, telah menjadi titik fokus untuk menggembleng upaya di seluruh dunia untuk menghadapi banyak tantangan yang dihadapi perempuan dalam situasi konflik. Hal tersebut memberikan kesempatan baik bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan perdamaian, memberikan perlindungan yang lebih baik dari pelanggaran

hak asasi manusia, dan memiliki akses ke keadilan dan layanan untuk menghilangkan diskriminasi.

Program UN Women pada perempuan, perdamaian dan keamanan dipandu oleh serangkaian komitmen hak-hak perempuan. Ini termasuk resolusi 1325, dan tujuh mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 dan 2242. Poin referensi utama lainnya adalah Beijing Platform for Action, dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan .

Dalam meningkatkan keterlibatan perempuan untuk perdamaian yang berkelanjutan memerlukan pendekatan terpadu yang secara bersamaan membahas pencegahan konflik, resolusi dan pemulihan, sekaligus memperkuat akuntabilitas nasional dan menjamin perlindungan perempuan dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan berbasis seksual dan gender. UN Women bekerja di bidang berikut untuk mencapai perubahan transformatif :[16]

- *Mediation and conflict prevention*
- *Peacebuilding and Recovery*
- *Peacekeeping*
- *Ending Impunity*
- *Countering Violent Extremism*
- *UN Cordinating and Reporting*

[16] http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20women%20briefthematicpsuswebrev3%20pdf.pdf diakses 25 Maret 2017

- *National Action Plans*
- *Catalytic Funding*

e) Aksi Kemanusiaan / *Humanitarian Action*

Ketika krisis terjadi, kehidupan masyarakat berubah dalam sekejap. Akibatnya, kematian, cedera, perpindahan, dan kehancuran infrastruktur dan lembaga berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Krisis memberikan dampak terhadap wanita, anak perempuan, anak laki-laki dan pria dari segala usia yang berbeda. Akibatnya, kebutuhan dan kepentingan mereka berbeda, seperti halnya sumber daya mereka, kapasitas dan strategi koping. Wanita sering menjadi responden pertama dalam krisis, dan mereka memainkan peran sentral dalam kelangsungan hidup dan ketahanan keluarga dan masyarakat.

Perempuan dan anak perempuan bukan korban tak berdaya. Upaya kemanusiaan harus mengakui fakta bahwa perempuan dan anak perempuan seperti laki-laki dan anak laki-laki memiliki banyak kontribusi dalam mempersiapkan, dan menanggapi krisis. Perempuan harus disertakan dalam pengambilan keputusan tentang bentuk bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Aksi kemanusiaan juga dapat menghadirkan kemunculan kesempatan untuk peran dan hubungan gender baru yang lebih progresif .[17]

UN Women telah berkomitmen untuk memastikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra dan penerima manfaat dari aksi

[17] http://www.unwomen.org/en/what-we-do/humanitarian-action diakses 27 Maret 2017

kemanusiaan. Pekerjaan dalam aksi kemanusiaan dipandu oleh serangkaian komitmen internasional dan ditetapkan dalam Strategi Kemanusiaan UN Women 2014-2017.[18] UN Women mendukung organisasi PBB lainnya dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam upaya kemanusiaan mereka. UN Women membantu negara anggota dalam melaksanakan kebijakan dan komitmen terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam aksi kemanusiaan. UN Women juga mempromosikan suara, lembaga dan kapasitas organisasi masyarakat sipil perempuan dalam upaya kemanusiaan.

UN Women memenuhi peran kemanusiaan dengan memberikan koordinasi dan kepemimpinan, keahlian teknis, pembangunan kapasitas, dan respon berdasarkan bukti dan advokasi untuk sistem kemanusiaan global .UN Women juga terlibat dalam persiapan untuk KTT Kemanusiaan Dunia pertama yang berlangsung di Istanbul Mei 2016. Tujuan dari KTT ini adalah untuk menemukan cara untuk memperkuat upaya global untuk menyelamatkan kehidupan dan mengurangi kesulitan dalam krisis. Hal ini membutuhkan fokus yang kuat pada kesetaraan gender dan hak-hak perempuan untuk memastikan bahwa solusi kemanusiaan baru menguntungkan perempuan dan laki-laki secara sama.[19]

f) Perencanaan Nasional dan Pemerintahan / *Governance and National Planning*

[18] Ibid
[19] Ibid

Ketimpangan gender mengindikasikan adanya kegagalan suatu Pemerintahan. Rencana nasional, kebijakan, kelembagaan dan anggaran mencerminkan bagaimana pemerintah menerjemahkan komitmen untuk kesetaraan gender dalam hasil untuk wanita. Terlalu sering, bagaimanapun, ada kesenjangan antara kebijakan dan praktek. Melihat dimensi-dimensi pemerintahan melalui lensa kesetaraan gender berarti mengesampingkan asumsi konvensional bahwa mereka netral gender. Hal ini menuntut komprehensif menilai kesenjangan gender dan mengidentifikasi tindakan untuk menutup mereka. Perubahan untuk mempromosikan kesetaraan gender perlu didukung oleh dana yang memadai, dan sistematis dipantau untuk kemajuan dalam mengurangi diskriminasi gender.[20]

UN Women mengadvokasi pembiayaan publik yang transparan dan memadai untuk kesetaraan gender, termasuk melalui adopsi anggaran responsif gender yang menyalurkan sumber daya yang memadai untuk pria dan wanita. Keterlibatan dengan pendukung kesetaraan gender membantu memperkuat keterampilan mereka untuk mempengaruhi publik pengambilan keputusan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Di Majelis Umum PBB, Komisi PBB tentang Status Perempuan dan di tempat lain, UN Women memainkan peran sentral dalam mendukung kuatnya kerangka normatif untuk pembiayaan untuk kesetaraan gender, dan memperkuat kapasitas sektor publik dan akuntabilita.

[20] http://www.unwomen.org/en/what-we-do/governance-and-national-planning diakses 25 Maret 2017

Sebuah dekade kerja UN Women di lebih dari 60 negara telah membuahkan hasil yang konkret. Kemitraan strategis telah dibentuk melalui Keuangan, Perencanaan dan sektor kementrian, pemerintah daerah, anggota parlemen, organisasi perempuan, kelompok masyarakat sipil, lembaga akademis, mitra pembangunan dan sistem PBB.

g) **Pembangunan Berkelanjutan /** ***Sustainable Development Agenda***

Sebagai organisasi terkemuka dengan mandat global untuk mempromosikan kesetaraan gender, hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan, UN Women menyerukan komitmen untuk mencapai kesetaraan gender , hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam kerangka pembangunan pasca-2015 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta pengarusutamaan kuat dari pertimbangan gender di semua bagian dari kerangka kerja.

Pada *postion paper*nya di tahun 2013 , UN Women mengadvokasi untuk tujuannya dalam agenda pembangunan pasca-2015 dalam mencapai kesetaraan gender, hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan, yang didasarkan pada hak asasi manusia dan menangani hubungan kekuasaan yang tidak setara.

UN Women mengusulkan target dari tujuan ke 5 (Goal 5) dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan yang terukur dan dapat dicapai. Tujuan komprehensif ini mencakup sembilan target yaitu :

- Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana-mana melalui langkah-langkah untuk mengubah norma-norma sosial dan praktek diskriminatif.
- Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua wanita dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan dan eksploitasi seksual..
- Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya pernikahan paksa anak dibwah umue dan mutilasi alat kelamin perempuan. Hal ini dapat dicapai melalui hukum reformasi, kebijakan dan tindakan perlindungan, mobilisasi masyarakat dan keterlibatan tokoh agama dan masyarakat, serta mereka yang terkena dampak.
- Mengenali dan menilai perawatan yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial.
- Memberikan partisipasi efektif dan kesempatan yang sama untuk perumpuan dalam kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat. Akuntabilitas demokratis dan legitimasi, keterlibatan penuh perempuan adalah kunci dalam melaksanakan agenda SDGs.
- Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak reproduksi. Untuk ini, mereka memerlukan akses ke informasi penting, pendidikan dan layanan.

- Melakukan reformasi untuk memberikan wanita hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam. Hal ini penting untuk memberikan keamanan ekonomi dan status, pekerjaan yang layak, mata pencaharian yang berkelanjutan dan untuk memastikan standar hidup yang layak.
- Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, teknologi komunikasi informasi tertentu (TIK), untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Akses ke infrastruktur yang berkualitas dan teknologi merupakan kunci untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kewirausahaan resmi perempuan dan untuk mengurangi pekerjaan perawatan yang tidak dibayar.
- Mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan undang-undang untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan. Legislasi nasional harus menjamin hak yang sama, selaras dengan standar internasional.[21]

h) HIV / AIDS

Ketidaksetaraan gender memberikan kontribusi terhadap penyebaran HIV. Hal ini dapat meningkatkan tingkat infeksi, dan mengurangi

[21] Why Goal 5 Matters. Diakses dari http://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015/why-goal-5-matters 30 Maret 2017

kemampuan perempuan dan anak perempuan untuk mengatasi epidemi. Sering kali, mereka memiliki sedikit informasi tentang HIV dan sumber daya yang lebih sedikit untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Kekerasan seksual, pelanggaran luas hak-hak perempuan, memperburuk risiko penularan HIV. Bukti menunjukkan bahwa pernikahan dapat menjadi faktor risiko utama, terutama bagi perempuan muda dan gadis-gadis. Banyak perempuan yang hidup dengan perjuangan HIV dengan stigma dan pengucilan, diperburuk oleh kurangnya hak-hak.

Membuat kesetaraan gender sebagai pusat untuk perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang diwujudkan dalam program-program UN Women itu sendiri. UN Women juga berkoordinasi dan mempromosikan kerja sistem PBB dalam memajukan kesetaraan gender.

UN Women membawa perspektif kesetaraan gender dan hak asasi manusia untuk bekerja pada perempuan dan HIV /AIDS. UN Women menjadi ujung tombak strategi yang dengan menganalisa faktor yang mendorong epidemi, seperti kekerasan terhadap perempuan, penolakan hak-hak hukum dan partisipasi terbatas perempuan dalam pengambilan keputusan. Strategi yang paling penting adalah memberdayakan perempuan dan menjamin hak-hak mereka sehingga mereka dapat melindungi diri dari infeksi, mengatasi stigma, dan mendapatkan akses yang lebih besar untuk pengobatan, perawatan dan dukungan.

Program UN Women membantu untuk memperkuat suara perempuan yang hidup dengan HIV, menggunakan strategi yang mempromosikan kepemimpinan dan partisipasi yang berarti dalam semua keputusan dan tindakan untuk merespon epidemi. UN Women mencari jalan untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan ke dalam strategi, kebijakan, anggaran, institusi dan kerangka kerja akuntabilitas. Beberapa inisiatif UN Women mengatasi beberapa persimpangan antara HIV dan kekerasan terhadap perempuan. Lainnya memajukan akses terhadap keadilan bagi perempuan dalam konteks HIV, dengan fokus pada harta benda dan hak warisan yang penting.

Pada bulan Juni 2012, UN Women menjadi lembaga ke 11 yang ikut mensponsori UNAIDS[22], hal tersebut merupakan langkah penting yang memastikan bahwa kesetaraan gender adalah jantung dari aksi global tentang HIV dan AIDS.[23]

UN Women memiliki agenda yang sangat terfokus, tetapi juga praktis, yakni membangun sebuah organisasi yang dapat membuat perbedaan berkelanjutan pada kehidupan perempuan dan anak perempuan dimanapun. UN Women telah menumbuhkan kesadaran bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tidak hanya memegang peranan sangat penting

---

[22] UNAIDS merupakan merupakan inovasi usaha bersama dari keluarga PBB yang menyatukan upaya dan sumber daya dari 11 organisasi sistem PBB untuk menyatukan dunia terhadap AIDS. Organisasi yang berpartisipasi yang membentuk UNAIDS, juga disebut kosponsors UNAIDS. Diakses dari http://www.un.org/youthenvoy/2013/08/unaids-joint-united-nations-programme-on-hivaids/ 30 Maret 2017

[23] http://www.unwomen.org/en what-we-do/hiv-and-aids#sthash.PYZu9DZW.dpuf diakses 1 April 2017

untuk kesejahteraan perempuan dan anak perempuan sendiri, tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, perubahan iklim dan kemanusiaan.

C. Struktur Keanggotaan UN Women

Resolusi Majelis Umum PBB 64/289 tahun 2010 menetapkan bahwa entitas baru (UN Women) harus dipimpin oleh seorang Perwakilan Sekretaris Jenderal dalam hal ini Eksekutif Direktur , yang akan ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB yang berkonsultasi dengan Negara-negara anggota untuk masa jabatan jangka waktu empat tahun, dengan kemungkinan perpanjangan selama satu periode.[24]

Organisisasi ini diatur oleh struktur pemerintahan antar beberapa pemerintah yang bertugas untuk memberikan panduan kebijakan normative dan operasional. Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), dan Komisi Status Perempuan (CSW) merupakan struktur pemerintah yang menetapkan kebijakan normatif dan prinsip-prinsip UN Women. Sedangkan untuk struktur pemerintahan antar pemerintah yang bertugas memberikan pedoman kebijakan operasional untuk UN Women termasuk didalamnya adalah Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Eksekutif Organisasi. Dan ditambah dengan empat puluh satu anggota, yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) untuk jangka waktu tiga tahun yang didistribusikan sebagai berikut :

[24] Resolution General Assembly A/RES/64/289. United Nations General Assembly. 2010.

- Sepuluh dari Kelompok Negara Afrika
- Sepuluh dari Kelompok Negara-negara Asia
- Empat dari Kelompok Eropa Timur
- Enam dari Kelompok Amerika Latin dan Karibia
- Lima dari Kelompok Eropa Barat dan Negara lainnya
- Enam dari Negara-negara yang berkontribusi. Empat kursi akan dipilih oleh dan dari sepuluh penyedia kontribusi terbesar untuk UN Women. Dua kursi yang tersisa akan dialokasikan untuk dua Negara berkembang bukan anggota Komite Bntuan Pembangunan atau *Development Assistance Committee* (DAC) dari organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau *Organization for Economic Coorperation and Development* (OECD) yang juga merupakan Negara contributor untuk entitas UN Women tersebut.[25]

[25] Resolution General Assembly A/RES/64/289, paraghraph 57. United Nations General Assembly. 2010.